



**BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 – 7989912-19

www.kemendes.go.id

Nomor : 846/BPI.01/XII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Seleksi Desa Cerdas Fase III

30 Desember 2022

**Yth. Daftar Terlampir
di Tempat**

Sehubungan dengan rangkaian Kegiatan Desa Cerdas (*Smart Village*), akan dilakukan seleksi Desa Cerdas di 80 Kabupaten lokus terpilih yang sudah dilakukan sosialisasi kegiatan Desa Cerdas. Proses Seleksi Desa Cerdas dilakukan untuk memilih desa yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai syarat yang telah ditetapkan. Terkait hal tersebut mohon dukungan Pemerintah Daerah untuk dapat meng-*upload* dokumen Seleksi Desa Cerdas pada link berikut <http://bit.ly/SeleksiDesaFase3>, mulai tanggal 31 Desember 2022 – 6 Januari 2023.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Shofiatul Husna (0858 8567 0794)**. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan
Pengembangan dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

#

Fince Decima Hasibuan, S.STP., M.Si.
NIP. 19771202 199612 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Bupati Kabupaten Lokus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE BSSN, untuk verifikasi keaslian dokumen dapat mengunduh VeryDS di playstore.

Lampiran
Nomor : 846/BPI.01/XII/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

DAFTAR LOKUS KABUPATEN

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Tengah;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Solok;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musirawas;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu;
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor;
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;

26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Demak;
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
33. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
34. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Kabupaten Cilacap;
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;
37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
39. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;
40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;
41. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun;
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
44. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;
45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Sleman;
46. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul;
47. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli;
48. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;
50. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu;
51. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang;
52. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak;

53. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sekadau;
54. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Gunung Mas;
55. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pulang Pisau;
56. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;
57. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar;
58. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu;
59. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Berau;
60. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung;
61. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
62. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
63. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Donggala;
64. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali;
65. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah;
66. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene;
67. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa;
68. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara;
69. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Luwu Timur;
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang;
71. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;
72. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep;
73. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
74. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo;
75. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;
76. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan;

- 77. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- 78. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan;
- 79. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- 80. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.

Sekretaris Badan
Pengembangan dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Fince Decima Hasibuan, S.STP., M.Si.
NIP. 19771202 199612 2 001